

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu dan masalah perkotaan di negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya sangat kompleks dibandingkan dengan yang terjadi di negara-negara industri maju. Masalah ekonomi berkaitan erat dengan masalah sosial politik. Pemenuhan kebutuhan perumahan atau perumahan lingkungan kumuh berkaitan dengan ketersediaan lahan. Sedangkan ketersediaan lahan sangat tergantung kepada distribusi lahan kota yang sangat timpang dan tidak memihak kepada golongan masyarakat menengah kebawah.¹

Masyarakat menengah kebawah yang tidak mampu mendirikan bangunan karena tidak memiliki penghasilan cukup, terkadang mereka akan mendirikan bangunan sebagaimana yang mereka mau tanpa mementingkan aspek-aspek layak atau tidaknya. Kebanyakan di kota-kota besar lainnya, seperti salah satu contoh nyata yang bisa kita lihat adalah ibukota Indonesia yakni DKI Jakarta, masih banyak masyarakat yang memiliki keadaan lingkungan perumahan yang tidak sehat, kepadatan bangunan yang tinggi, status yang tidak jelas serta beberapa masyarakat yang masih bermukim di bantaran sungai juga rel kereta api.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dijelaskan bahwa keberpihakan negara terhadap

¹Achmad Nurmandi, *Manajemen Perkotaan Teori Organisasi, Perencanaan, Perumahan, Pelayanan dan Transportasi Mewujudkan Kota Cerdas*, (Yogyakarta: JKSG UMY, 2014), hal 11.

masyarakat berpenghasilan rendah dalam hal ini Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan kemudahan berupa pembiayaan, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum, keringanan biaya perizinan, bantuan stimulan dan insentif fiskal.

Pertumbuhan daerah perkotaan yang sangat pesat berujung pada meningkatnya tempat tinggal yang tidak layak mulai dari sarana, prasarana hingga utilitasnya, keterbatasan pemerintah dalam mengantisipasi kondisi seperti ini pada akhirnya menciptakan kawasan kumuh perkotaan. Fenomena ini kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengedepankan paradigma masyarakat sebagai subjek dengan membuka pintu keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan perumahan. Hal ini juga diperuntukkan sebagai peluang kemitraan antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.²

Seperti yang dikemukakan dalam Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat sekitar 22% penduduk perkotaan di Indonesia yang bermukim di wilayah

²Oswar Mungkosa, *Peluang dan Tantangan Penanganan Permukiman Kumuh melalui Kemitraan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat*, Inforum Edisi Khusus 2012, hal 10.

permukiman kumuh dimana akses terhadap pelayanan dasar minimumnya masih rendah. Pada tahun 2014, telah diidentifikasi bahwa permukiman kumuh di Indonesia mencapai sekitar 38.000 Ha yang tersebar lebih dari 3.500 kelurahan yang ada di Indonesia. Kriteria kumuh tersebut ditandai dengan perumahan-perumahan yang masih dibawah standar, masih belum terpenuhinya akses infrastruktur dasar (air, sanitasi, jalan, dll), kesehatan lingkungan yang buruk serta kawasan rumah yang kondisinya berdesak-desakan dan rentan akan bencana alam.³

Pentingnya penanganan permasalahan permukiman kumuh ini, sejalan dengan apa yang sudah ditegaskan didalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai salah satu lembaga pemerintah, telah memiliki komitmen untuk memberantas kawasan permukiman kumuh dengan tepat sasaran. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mewujudkan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR

³Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya - Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, 2016, diakses pada tanggal 18 November 2017.

membentuk program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai “panggung” kolaborasi dalam menangani permasalahan permukiman kumuh dimana pemerintah daerah dapat mengarahkan pelaksanaan kegiatan melalui fasilitator disetiap kelurahan.

Kota Malang merupakan salah satu kota yang mendapatkan fasilitas program KOTAKU karena masih banyaknya kawasan permukiman kumuh yang harus diberikan perhatian. Terdapat 29 kelurahan di Kota Malang yang termasuk kedalam kawasan permukiman kumuh yang terdiri dari 604,4 Ha atau sekitar 5% dari wilayah Kota Malang, namun tidak semua kelurahan tersebut kumuh, hanya beberapa kawasan seperti satu ataupun dua RW, kawasan kumuh ini terbagi menjadi tiga kategori yaitu, kumuh ringan, kumuh sedang dan kumuh berat. Pembagian kategori permukiman kumuh tersebut telah dibagi berdasarkan klasifikasinya masing-masing. Dari tiga kategori tersebut, yang menjadi dominasi dari 29 kelurahan tersebut adalah kumuh sedang dimana aspek sarana dan prasarannya ada yang cukup baik dan masih ada yang kurang baik.⁴

Salah satu kelurahan yang mendapatkan fasilitas program KOTAKU adalah Kelurahan Kidul Dalem. Kawasan Kelurahan Kidul Dalem memiliki permasalahan ketidakteraturan bangunan serta sarana infrastruktur dasar masyarakat yang juga masih kurang seperti MCK pribadi yang masih belum mereka miliki. Kebanyakan masyarakat yang bermukim disana masih melakukan

⁴Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Malang.

kegiatan seperti membuang sampah dan membuang limbah langsung ke arah sungai. Hal ini disebabkan karena kawasan Kelurahan Kidul Dalem yang berada di sempadan Sungai Brantas. Beberapa masyarakat yang berada di Kelurahan Kidul Dalem tersebut telah tinggal dan hidup selama bertahun-tahun dengan kondisi kehidupan yang tidak sehat.

Kelurahan Kidul Dalem hanya salah satu contoh dari beberapa kelurahan lain yang mendapatkan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), beberapa permasalahan lain seperti kepadatan bangunan yang menyebabkan ketidakteraturan permukiman sehingga lingkungan terlihat kumuh memang menjadi hal pertama permasalahan permukiman kumuh di Kota Malang, masih banyaknya masyarakat Kota Malang yang bermukim di bantaran sungai juga menjadi salah satu faktornya. Tidak hanya itu, jaringan jalan yang tidak berfungsi dengan baik atau berlubang, sanitasi umum dan drainase yang tidak berfungsi serta sampah yang belum dikelola dengan baik merupakan hal-hal yang menjadikan Kota Malang terpilih sebagai kota yang mendapat fasilitas program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).

Permasalahan permukiman kumuh merupakan sebuah tantangan bagi pemerintah sehingga perlunya sebuah kolaborasi dari beberapa pihak. Pihak-pihak yang terlibat secara kolaboratif tersebut diharapkan dapat memberikan sebuah pengaruh yang positif diantaranya meningkatkan komitmen pemerintah dalam menciptakan kota yang layak huni bagi masyarakatnya serta meningkatkan rasa

tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara apa yang sudah berhasil dibangun.⁵

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan di kota lain, aspek kelembagaan merupakan strategi penting dalam menangani permasalahan permukiman kumuh. ⁶Mengembangkan kerjasama antar instansi dalam struktur pemerintahan baik pusat maupun daerah dalam rangka membangun koordinasi dan konsolidasi khususnya dalam pelaksanaan program pembangunan, selain itu juga penguatan kapasitas kelembagaan yang telah ada dibidang pembangunan permukiman baik itu melalui peningkatan manajemen, kualitas sumber daya manusia dan sebagainya dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang baik juga akuntabel. Tidak hanya itu, kerjasama atau kemitraan antar pemerintah, swasta dan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka percepatan pembangunan melalui partisipasi aktif dari semua pihak baik individu maupun kelembagaan.

Pemerintah pusat sebagai lembaga yang mempunyai kebijakan program KOTAKU berperan dalam memberikan dukungan kebijakan serta pedoman, pemerintah pusat juga mengambil peran sebagai subsidi pembangunan infrastruktur dan bantuan teknis sedangkan pemerintah daerah sebagai penggerak utama program ini dirancang sebagai lembaga yang mengembangkan

⁵Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 40/ SE/ DC/ 2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh

⁶Cihe Aprilia Bintang, S.T, M.T, *Analisa Strategi Penataan Permukiman dan Infrastruktur di Kabupaten Pelalawan*, Jurnal Saintis, Volume 14 Nomor 1, April 2014, hal 80.

perencanaan dan pelaksanaan penanganan permukiman kumuh serta penyedia bantuan teknis dalam memperkuat sistem informasi dan monitoring.

Sebagai salah satu kota yang mendapatkan fasilitas program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), Pemerintah Kota Malang tidak hanya melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menangani program ini melainkan juga pihak swasta dan tentunya masyarakat. OPD yang menangani pun tidak hanya terbatas disatu OPD melainkan beberapa OPD lainnya. Begitu pun ditingkat pusat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak hanya menangani permasalahan ini sendiri melainkan juga dibantu oleh beberapa Kementerian terkait. Sangat tidak memungkinkan jika program ini ditangani oleh beberapa pihak saja, penanganan ini membutuhkan banyak aktor yang tentunya dapat diajak berkolaborasi dalam mengentaskan permasalahan permukiman kumuh.

Program ini tentu tidak terlepas dari peran swasta yang ikut terlibat dalam menangani program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), di Kota Malang sendiri pihak swasta masih membantu pemerintah dalam hal pendanaan, karena anggaran pemerintah yang ada masih terbatas. Salah satu contoh nyata yang telah terwujud adalah kerjasama pemerintah dengan pihak swasta dalam pembangunan Kampung Biru yang letaknya bersebrangan dengan Kampung Warna Warni Jodipan. Kampung Biru merupakan sebuah perkampungan yang berada di kawasan Kelurahan Kidul Dalem. Perkampungan tersebut dulunya merupakan

perkampungan kumuh, namun sekarang berhasil dirubah menjadi sebuah perkampungan yang menjadi destinasi masyarakat untuk dikunjungi.

Masyarakat pun juga dituntut untuk ikut berperan aktif dalam program ini, berbagai program pemerintah yang diluncurkan tujuannya adalah untuk masyarakat semata. Namun dalam program ini masyarakat tentu tidak hanya menerima apa yang diberikan oleh Pemerintah melainkan juga ikut berperan aktif dilingkungannya. Salah satu contohnya adalah pembuatan taman yang berada di Kawasan Kampung Biru Arema. Ide untuk membuat taman bertema tentunya merupakan ide dari masyarakat sendiri. Pembuatan taman dilakukan agar Kampung Biru Arema memiliki ikon tersendiri diantara kampung-kampung tematik lainnya. Begitu pembangunan taman bertema telah diwujudkan, mau tidak mau masyarakat yang terlibat dalam pembangunan taman tersebut akan menjaga apa yang sudah mereka bangun, hal ini dianggap sebagai suatu perubahan kecil dimasyarakat.

Pemerintah Kota Malang yang didukung oleh berbagai pihak dalam melakukan kolaborasi tentu tidak selalu berjalan lancar, adanya beberapa kendala yang didapatkan dalam proses kolaborasi ini, salah satunya ketika melibatkan banyak pihak tentunya proses komunikasi menjadi hal yang penting diantara partisipan yang terlibat. Adanya *miscommunication* diantara beberapa pihak membuat kegiatan mengalami sedikit hambatan.

Tidak hanya Kota Malang yang dalam proses kolaborasinya mendapatkan kendala, salah satu kota yang juga memiliki kendala dalam proses kolaborasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah Kelurahan Semanggi di Kota Surakarta, salah satu kendala yang dihadapi adalah kendala komunikasi. Sulitnya menemukan waktu yang tepat dalam melakukan koordinasi dikarenakan banyaknya *stakeholder* yang terlibat, menjalin komunikasi antar instansi tidaklah mudah, biasanya terjadi permasalahan komunikasi antar unit pelaksana program karena komitmen yang tidak sama dalam pengadaan rapat.⁷

Munculnya persepsi yang berbeda antar *stakeholder* terkadang menimbulkan ego sektor dan kurangnya kepercayaan atas kinerja dari *stakeholder* lain yang terlibat,⁸ maka dari itu pemilihan aktor juga menjadi hal yang penting didalam proses kolaborasi, mengungkapkan kepentingan aktor serta keterlibatan mereka dalam kolaborasi menjadi salah satu hal penting untuk melihat dampak yang ditimbulkan, apakah nantinya akan terjadi perbedaan-perbedaan kepentingan sehingga mempengaruhi proses kolaborasi.⁹

Dalam penelitian konsep *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash ditemukan bahwasanya membangun kepercayaan sering menjadi aspek yang paling menonjol dari proses kolaboratif. Membangun

⁷Sri Yuliani dan Gusty Putri Dhini Rosyida, *Kolaborasi dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta*, Jurnal Wacana Publik, Volume 1 Nomor 2, hal 43-44.

⁸Tika Mutiarawati dan Sudarmo, *Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan*, Jurnal Wacana Publik, Volume 1 Nomor 2, hal 60.

⁹Dimas Luqito Chusuma Arrozaq, *Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo)*, Universitas Airlangga, hal 7.

kepercayaan diantara pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi tidaklah mudah karena membangun kepercayaan adalah sebuah proses yang memakan waktu. Maka dari itu Ansell dan Gash menegaskan bahwa komunikasi merupakan hal paling penting dalam proses kolaborasi, dimana membangun kepercayaan dapat dimulai dengan komunikasi terus-menerus antar lembaga dan *stakeholder* juga masyarakat untuk saling berbicara satu sama lain. Lembaga, *stakeholder* dan masyarakat tentu harus bertemu bersama dalam setiap musyawarah yang ada.

Terkadang dalam prosesnya, kolaborasi memang tidak selalu berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang ada. Pemaksimalan komitmen, kepercayaan dan kewenangan diantara pihak-pihak yang terlibat selalu memiliki dinamika tersendiri. Namun, pemerintah Kota Malang terus meminimalisir setiap kendala yang dihadapi dan terus berkomitmen terhadap visi dan misi mereka agar Kota Malang bisa terhindar dari permasalahan permukiman kumuh.

Kerjasama yang didukung oleh banyak pihak ini tentunya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan ruang kolaborasi dan mengembangkan kelembagaan serta membangun jaringan penanganan permasalahan permukiman kumuh mulai dari pemerintah pusat hingga masyarakat.¹⁰ Penanganan permukiman kumuh merupakan acuan bagi pemerintah untuk membangun kapasitas pemerintah serta masyarakat agar mampu

¹⁰Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 40/ SE/ DC/ 2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh, hal 7.

melaksanakan dan mengelola wilayahnya secara mandiri dengan menerapkan tata kelola yang baik.

Pada dasarnya, hal yang melatar belakangi dilakukannya konsep *collaborative governance* dalam program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) karena adanya sebuah kerumitan dan keterbatasan pemerintah untuk menjawab sebuah permasalahan publik, dimana penanganan permasalahan permukiman kumuh tidak bisa ditangani oleh pemerintah sendiri. Maka dari itu, pemerintah mengajak berbagai pihak untuk ikut terlibat secara kolaboratif dalam menuntaskan permukiman kumuh di Indonesia, dengan dikembangkannya konsep *collaborative governance* ini, pemerintah berharap akan mendapat dukungan sumberdaya dari berbagai pihak yang terlibat seperti pihak swasta dan masyarakat.

Berdasarkan hal inilah, penelitian ini lebih menekankan konsep *collaborative governance* agar permasalahan permukiman kumuh di Kota Malang bisa diselesaikan dengan tepat sasaran, apabila permasalahan ini tidak ditangani dengan baik dan tidak efektif maka dapat dipastikan luas permukiman kumuh di Kota Malang akan terus meningkat setiap tahunnya.

Penelitian ini pun merupakan suatu pengembangan bagi para akademisi ilmu pemerintahan dalam mengkaji pola hubungan antar pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dalam menangani permasalahan permukiman kumuh. Tidak menutup kemungkinan jika nantinya banyak akademisi ilmu pemerintahan yang akan terlibat langsung dalam proses kolaborasi ini, tidak hanya menangani

permasalahan permukiman kumuh melainkan juga permasalahan sosial lainnya yang ada dimasyarakat, dimana pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan dengan konsep *collaborative governance*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kolaborasi pemerintah dalam penanganan permukiman kumuh melalui program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kota Malang?
2. Apa saja hambatan kolaborasi pemerintah dalam implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kolaborasi pemerintah dalam penanganan permukiman kumuh melalui program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui hambatan kolaborasi pemerintah dalam implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengembangan pengetahuan tentang kolaborasi pemerintah dalam penanganan pemukiman kumuh melalui program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kampung Biru Arema Kota Malang serta penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lainnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dengan menghadirkan manfaat praktis terhadap disiplin ilmu pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan acuan oleh berbagai pihak.

E. Definsi Konsep

1. *Collaborative Governance*

Ansell memberikan pengertian singkat mengenai kolaborasi pemerintah yakni “*a governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets*”,¹¹ dalam hal ini Ansell mengemukakan bahwa terdapat sebuah pengaturan pemerintah dimana satu atau lebih lembaga publik yang secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses

¹¹Chriss Ansell & Alison Gash, *Collaborative Governance in Theory and Practice*, *Journal of Public Administration Research and Theory*, University of California, Berkeley, hal 544.

pengambilan keputusan bersama dan sifatnya musyawarah. Kolaborasi pemerintah ini juga bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola sebuah program pemerintah.

Terdapat beberapa item penting dalam keberhasilan kolaborasi yaitu jenis struktur jaringan kolaborasi, komitmen terhadap program yang akan dijalankan tersebut, kepercayaan diantara para *stakeholder*, kejelasan dalam tata kelola, akses terhadap otoritas, pembagian akuntabilitas atau resonsibilitas, *information sharing* atau berbagai informasi diantara *stakeholder* serta akses terhadap sumber daya. Hal-hal tersebut merupakan bagian yang harus diperhatikan didalam menjalankan sebuah kolaborasi pemerintah agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman diantara pemerintah, *stakeholder* serta masyarakat.

2. Permukiman Kumuh

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan kumuh diartikan sebagai perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Permukiman yang tidak layak huni ini disebabkan karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Pemukiman kumuh juga dikemukakan oleh Budiharjo yang menyebutkan bahwa permukiman kumuh merupakan lingkungan hunian yang

kualitasnya sangat tidak layak huni, ciri-cirinya antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan atau tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya.¹²

3. Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten atau kota di 34 propinsi yang menjadi basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota, swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.¹³

Pada dasarnya program ini memiliki tujuan untuk membangun sebuah unsur terpadu dalam menangani permasalahan permukiman kumuh dimana pemerintah melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya dan tentunya melibatkan peran serta masyarakat. Pentingnya kolaborasi dilakukan agar permasalahan permukiman dapat terselesaikan secara efisien walaupun sangat minim harapan untuk menciptakan Indonesia sebagai negara yang bebas dari permasalahan kumuh.

¹²Eko Budiharjo, *Sejumlah Masalah Permukiman Perkotaan*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2007)

¹³Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 40/ SE/ DC/ 2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh.

F. Definisi Operasional

1. Potret permukiman kumuh di Kota Malang sebelum adanya program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)
 - a. Sarana infrastruktur yang belum memadai.
2. Dampak yang dihasilkan selama program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dilaksanakan
 - a. Luas permukiman kumuh berkurang.
3. Kolaborasi pemerintah dalam penanganan permasalahan permukiman kumuh melalui program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)
 - a. Jenis struktur jaringan kolaborasi dalam program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).
 - b. Komitmen terhadap tujuan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).
 - c. Kepercayaan diantara partisipan yang terlibat dalam program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).
 - d. Kejelasan dalam tata kelola program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).
 - e. Akses terhadap otoritas terkait dengan prosedur dan tugas masing-masing pihak.
 - f. Pembagian akuntabilitas atau responsibilitas kepada *stakeholder*.
 - g. *Information sharing* diantara pihak-pihak yang terlibat dalam program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).
 - h. Penyediaan sumber daya dalam program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).
4. Hambatan kolaborasi pemerintah dalam implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

- a. Kepentingan.
- b. Komunikasi
- c. Anggaran.

G. Metode Penelitian

Penelitian (*research*) merupakan suatu istilah khas dalam dunia ilmiah. Melakukan penelitian kualitatif dalam dunia keilmuan merupakan suatu aktivitas pengamatan (*observasi*) terhadap aktivitas orang yang diteliti dan situasi sosialnya. Penelitian juga bisa diartikan sebagai suatu aktivitas dimana kita dapat mewawancarai sejumlah orang sehingga terungkap ide atau keinginan yang ada dibalik pernyataan dan aktivitas mereka, penelitian juga bisa dalam bentuk membaca informasi dari sebuah dokumentasi seperti catatan sebuah organisasi, kantor atau pribadi.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini yaitu jenis penelitian deskriptif, dalam hal ini peneliti akan mendiskripsikan mengenai Kolaborasi Pemerintah dalam Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kampung Biru Arema Kota Malang.

Adapun pendapat dari Whitney yang menyatakan bahwa metode penelitian deskriptif merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah yang ada didalam

¹⁴Dr. Hamidi, M.Si, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), hal 3.

masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.¹⁵

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Data primer merupakan data yang didapatkan atau diperoleh langsung dari narasumber atau *key informan*. Sumber data primer berasal dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Malang serta Koordinator Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kota Malang. Data yang didapatkan berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.
- b. Data sekunder merupakan data yang didapatkan atau diperoleh dari studi kepustakaan atau sumber peneliti lain seperti buku, jurnal, penelitian terdahulu, media massa seperti internet, peraturan perundang-undangan serta bacaan atau sumber lain yang terkait dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik menggali informasi oleh peneliti sebagai sebuah instrumen dalam mendapatkan sebuah data sesuai dengan penelitian.¹⁶ Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan yakni berupa observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

¹⁵Moh. Nazir, Ph.D, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2014), hal 16.

¹⁶Ibid, hal 71.

a. Observasi

Peneliti akan melakukan sebuah observasi lapangan dimana maksud dari observasi lapangan adalah pengamatan langsung untuk memahami apa yang diketahui oleh subjek penelitian yang berkaitan langsung dengan tema yang diangkat dalam penelitian.¹⁷ Observasi juga dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data atau keterangan yang dilakukan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ditempat yang akan diselidiki.¹⁸ Peneliti akan melakukan observasi lapang untuk melihat langsung sejauh mana program KOTAKU yang telah dijalankan.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dikenal dalam penelitian kualitatif pada umumnya adalah wawancara yang mendalam. Teknik ini menuntut peneliti agar mampu bertanya sebanyak-banyaknya dengan perolehan jenis data tertentu sehingga diperoleh data atau informasi yang rinci. Wawancara mendalam berarti menggali informasi atau data sebanyak-banyaknya dari responden atau informan.¹⁹ Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber yang telah ditetapkan dalam subjek penelitian.

¹⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal 226.

¹⁸Arikunto. S, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal 124.

¹⁹Ibid, hal 72.

Sebelum melakukan teknik wawancara, sebaiknya peneliti dan narasumber harus membangun hubungan yang baik sehingga narasumber akan lebih bersikap terbuka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh peneliti, biasanya peneliti akan menyusun beberapa pertanyaan yang terstruktur sehingga fokus pembicaraan dalam teknik wawancara ini lebih terarah, dalam teknik wawancara biasanya peneliti dituntut untuk bertanya sebanyak mungkin agar data atau informasi yang diperoleh dapat lebih terinci.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.²⁰ Sugiyono berpendapat bahwa dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar ataupun karya-karya monumental dari seseorang.²¹ Dokumentasi merupakan salah satu metode terpenting dalam teknik pengumpulan data karena dokumentasi menunjukkan sebuah fakta atau kebenaran yang ada dilapangan dan mudah didapatkan.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan sebuah informasi tentang sesuatu yang sedang diteliti. Agar mendapatkan informasi yang relevan, maka subjek penelitian dalam penelitian ini adalah:

²⁰Ibid, hal 72.

²¹Ibid, hal 240.

1. Koordinator program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).
2. Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Malang.
3. Pihak swasta yang terlibat (PT. Inti Daya Guna Aneka Warna).
4. Ketua Kampung Biru Arema Kota Malang.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan oleh penulis sebagai tempat untuk mendapatkan data dari suatu penelitian yang sedang diteliti sehingga data yang didapatkan lebih akurat. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kantor Koordinasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kota Malang, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Malang, PT. Inti Daya Guna Aneka Warna (Indana) dan Kampung Biru Arema.

6. Analisis Data

Analisis data digunakan untuk mengungkapkan data apa yang masih perlu dicari, hipotesis apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapat informasi baru serta kesalahan apa yang harus segera diperbaiki. Adapun pendapat dari Bodgan dan Biklen (1992) yang menyatakan bahwa proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan

lapangan dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan.²²

Ada berbagai cara untuk menganalisis sebuah data, menurut Creswell terdapat beberapa langkah dalam menganalisis data yakni sebagai berikut:²³

- a. Mengolah dan menafsirkan data untuk segera dianalisis, langkah ini melibatkan transkrip atau salinan wawancara, mengetik catatan lapangan, mensortir dan mengatur data menjadi berbagai jenis sesuai dengan sumber informasi.
- b. Membaca keseluruhan data yang telah diperoleh kemudian membuat catatan atau gagasan penting dari data yang telah diperoleh tersebut.
- c. Mulai meng*coding* data dengan menganalisis lebih detail data yang diperoleh, *coding* diartikan sebagai proses mengolah materi atau informasi menjadi bagian-bagian tulisan sebelum memaknainya.
- d. Setelah mulai meng*coding* data, selanjutnya peneliti akan menerapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan kategori dan tema yang akan dianalisis.
- e. Setelah mendeskripsikan kategori dan tema yang dianalisis maka selanjutnya kita akan menyajikan data yang telah dianalisis tersebut kedalam bentuk narasi atau laporan kualitatif.
- f. Memeriksa keakuratan hasil penelitian.

²²Husnaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal 83-84.

²³John. W Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 4th edition*, (California: SAGE Publications Inc, 2013), hal 247-250.